

**PENYELESAIAN KREDIT MACET DALAM PERJANJIAN KREDIT
DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA PT. BANK MANDIRI (PERSERO)
TBK. PEKANBARU
SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)**



OLEH

**DELVY SELVIA NOFITRI
10927006599**

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2013**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERANCANGAN STRATEGI BAURAN PEMASARAN (7P)
BERDASARKAN ANALISIS *SEGMENTING, TARGETING, DAN
POSITIONING* UNTUK MENINGKATKAN PENJUALAN
PADA USAHA ROYAL PIZZA PEKANBARU**

TUGAS AKHIR

Oleh:

AZIRWAN MUSTAKIM
10952007983

Telah Diperiksa dan Disetujui Sebagai Laporan Tugas Akhir
Di Pekanbaru Pada Tanggal 30 Januari 2014

Koordinator Tugas Akhir


Miska Hartati, M.T
NIK.130 508 037

Pembimbing Tugas Akhir


Dewi Diniaty, S.T, M.Ec, Dev
NIK.130 512 062

LEMBAR PENGESAHAN

PERANCANGAN STRATEGI BAURAN PEMASARAN (7P)
BERDASARKAN ANALISIS SEGMENTING, TARGETING, DAN
POSITIONING UNTUK MENINGKATKAN PENJUALAN
PADA USAHA ROYAL PIZZA PEKANBARU

TUGAS AKHIR

Oleh:

AZIRWAN MUSTAKIM

10952007983


Telah dipertahankan di depan sidang dewan penguji
Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik
Pada Jurusan Teknik Industri Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Di Pekanbaru Pada Tanggal 30 Januari 2014

Pekanbaru, 30 Januari 2014
Mengesahkan.


Dekan Fakultas Sains dan Teknologi

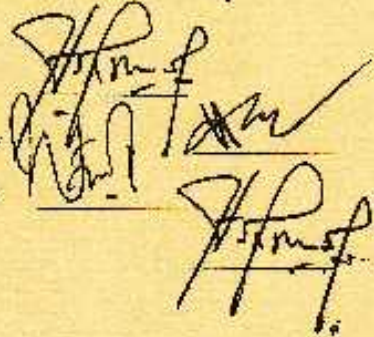
Dr. H. Xenita Morena, M.Si
NIP. 19601125 198503 2 002

Ketua Jurusan Teknik Industri


Ismu Kusumanto, M.T
NIP. 19730412200710 1 002

Dewan Penguji :

Ketua : Ismu Kusumanto, M.T
Sekretaris : Dewi Diniaty, S.T, M.Ec, Dev
Anggota I : Wresni Anggraini, S.T, M.M
Anggota II : Ismu Kusumanto, M.T



ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **Penyelesaian Kredit Macet Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Pekanbaru.**

Pembangunan ekonomi di Indonesia semakin pesat, dengan demikian kebutuhan akan dana semakin meningkat, dan bank sebagai salah satu lembaga keuangan siap memberikan kredit kepada siapa saja yang membutuhkan. Bank dalam memberikan kredit akan berhati-hati dan melalui analisis yang mendalam terhadap kemampuan debitur untuk mengembalikan utangnya. Namun kredit yang diberikan oleh bank tidak selamanya berjalan dengan mulus, adakalanya terjadi kredit macet. Penyelesaian terhadap kredit macet pun tidak selalu dapat terselesaikan dengan baik. Atas dasar itulah penulis tertarik untuk mengkaji penyelesaian kredit macet dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Pekanbaru.

Masalah dalam penelitian ini adalah faktor apa yang menyebabkan terjadinya kredit macet pada PT. Bank Mandiri(Persero) Tbk. Pekanbaru, bagaimana bentuk penyelesaian yang dilakukan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Pekanbaru apabila terjadi kredit macet dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, dan bagaimana proses eksekusi jaminan fidusia dalam penyelesaian kredit macet tersebut.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Adapun yang menjadi lokasi dalam penelitian ini adalah PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Pekanbaru yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 140 Pekanbaru. Dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyelesaian kredit macet dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Pekanbaru.

Selanjutnya hasil penelitian yang penulis dapatkan dilapangan faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Pekanbaru berasal dari pihak bank dan juga debitur yaitu terdapatnya kesalahan verifikasi data, salah investasi, kondisi usaha debitur yang menurun, serta adanya kredit topengan. Bentuk penyelesaian yang dilakukan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Pekanbaru apabila terjadi kredit macet adalah melalui restrukturisasi, memberikan somasi/teguran, Penagihan dengan iklan atau media massa, serta penagihan secara langsung. Bentuk penyelesaian yang diberikan oleh bank mandiri sangat beragam, tergantung sejauh mana debitur menagalami kesulitan pembayaran. Apabila penyelesaian tersebut tidak dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya maka pihak bank akan menempuh cara yang terakhir yaitu dengan melakukan eksekusi terhadap jaminan fidusia. Dan proses eksekusi jaminan fidusia pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Pekanbaru mengacu pada pasal 29 Ayat 1 Huruf C Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan fidusia yaitu dengan penjualan dibawah tangan. Penjualan dibawah tangan dilakukan berdasarkan kesepakatan antara debitur dan pihak bank.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji syukur kepada ALLAH SWT. Karena atas berkat dan rahmat Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “ **PENYELESAIAN KREDIT MACET DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. PEKANBARU** ”, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum Universitas Islam Neeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Selama proses penyelesaian skripsi ini sejak penyusunan proposal penelitian, studi kepustakaan, pengumpulan data lapangan serta pengolahan hasil penelitian sampai terselesaikannya penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan baik sumbangan pemikiran maupun tenaga yang tak ternilai harganya dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada :

1. Kedua orang tua penulis, Papa dan Mama yang selalu mendoakan penulis dan memberikan dukungan serta bimbingan selama proses perkuliahan hingga akhir perkuliahan penulis.
2. Bapak Prof.Dr.H.M. Nazir selaku Rektor UIN SUSKA Riau.
3. Bapak. Dr. Akbarizan, M.A, M.Ag. selaku dekan Fakultas Syari’ah Dan Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau.
4. Kepada Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA RIAU.
5. Ibu Hj. Nur’aini Sahu, SH.MH. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau.
6. Ibu Lysa Angrayni, SH.MH. selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan serta arahan dalam penyelesaian skripsi ini.

7. Bapak M. Adil Yusrizal beserta staff PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Pekanbaru yang telah membantu penulis memperoleh informasi dalam penelitian skripsi ini.
8. Pimpinan perpustakaan beserta staff yang telah memberikan fasilitas untuk mengadakan studi kepustakaan.
9. Adik-adik beserta keluarga besar penulis yang selalu memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Kepada Afrizal Riandi seseorang yang selalu memberikan semangat dan bantuan kepada penulis.
11. Kepada teman-teman angkatan 2009 khususnya Ilmu Hukum 2 UIN SUSKA RIAU.

Pekanbaru, Oktober 2013

DELVY SELVIA NOFITRI

10927006599

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II GAMBARAN UMUM BANK MANDIRI.....	18
A. Profil Bank Mandiri.....	18
B. Visi Dan Misi Bank Mandiri.....	18
C. Strategi Dan Tujuan Bank Mandiri.....	19
BAB III TINJAUAN UMUM.....	21
A. Tinjauan Umum Perjanjian.....	21

1. Pengertian Perjanjian.....	21
2. Syarat Sah Perjanjian.....	22
3. Asas-Asas Perjanjian.....	23
B. Tinjauan Umum Jaminan Fidusia.....	33
1. Pengertian Jaminan Fidusia.....	33
2. Subjek Dan Objek Jaminan Fidusia.....	38
3. Eksekusi Jaminan Fidusia.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet Pada PT. Bank Mandiri	
(Persero) Tbk. Pekanbaru.....	45
B. Bentuk Penyelesaian Kredit Macet Pada PT. Bank Mandiri (Persero)	
Tbk. Pekanbaru.....	55
C. Proses Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Penyelesaian Kredit Macet	
Pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.Pekanbaru.....	60
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan Nasional merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, dalam rangka dan meneruskan pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum memerlukan dana besar. Seiring dengan meningkatnya pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut melalui pinjam-meminjam.¹

Pinjam meminjam uang dalam kegiatan perbankan di Indonesia disebut kredit. Salah satu kegiatan usaha pokok bagi bank konvensional adalah berupa pemberian kredit dan dikenal dengan sebutan kredit perbankan. Kredit perbankan disalurkan bank kepada masyarakat sesuai dengan fungsi utamanya yaitu menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat.

Menurut Pasal 1 Ayat (2)Undang – undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan menyebutkan pengertian bank yaitu:

¹ Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan*, (Semarang: Universitas Diponegoro Press, 2008), h. 32.

“ Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Dari rumusan pengertian bank sebagaimana yang ditetapkan oleh ketentuan undang – undang tersebut diatas, dapat diketahui bahwa kredit adalah salah satu bentuk kegiatan usaha bank dalam rangka menyalurkan dana kepada masyarakat.²

Dalam Pasal 1 Ayat 11 UU No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dirumuskan bahwa :

“ Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Berdasarkan pengertian diatas menunjukan bahwa prestasi yang wajib dilakukan oleh debitur atas kredit yang diberikan kepadanya adalah semata – mata melunasi utangnya tetapi juga disertai dengan bunga sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.³

Dasar kredit adalah kepercayaan, pihak yang memberi kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah diperjanjikan, baik itu menyangkut jangka waktu, prestasi dan kontra prestasi. Prestasi adalah kewajiban yang harus dilaksanakan debitur yang merupakan hak dari kreditur, sedangkan kontra prestasi adalah sesuatu yang

² M. Bahsan, *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2000), h.73-75.

³ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Kencana, 2009), h.57

harus diberikan oleh satu pihak atas prestasi pihak lain. Kondisi seperti ini sangat diperlukan oleh bank mengingat sebagian besar dana pada bank adalah milik pihak ketiga. Untuk itu diperlukan kebijaksanaan dalam penggunaan dana tersebut termasuk dalam hal pemberian kredit.

Bank menjalankan fungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.⁴ Dalam menjalankan fungsinya, bank menyediakan fasilitas kredit dan berbagai jasa lainnya. Dalam proses pemberian kredit pihak bank lebih mensyaratkan adanya jaminan. Hal ini sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang berbunyi:

“ Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.”

Jaminan kredit yang diterima bank akan mempunyai beberapa fungsi dan salah satunya adalah untuk mengamankan pelunasan kredit bila pihak peminjam cidera janji. Bila kredit yang diterima pihak peminjam tidak dilunasinya sehingga menimbulkan kredit macet, jaminan kredit yang diterima bank akan dicairkan untuk pelunasan kredit macet tersebut. Dengan demikian jaminan kredit mempunyai peranan penting bagi pengamanan pengembalian dana bank yang disalurkan kepada pihak peminjam melalui pemberian kredit. Dalam praktek

⁴ Ibid., h. 20.

perbankan dapat diperhatikan tentang terjadinya penjualan objek jaminan kredit untuk melunasi kredit macet tersebut.⁵

Pada dasarnya, pemberian kredit oleh bank diberikan kepada siapa saja yang memiliki kemampuan untuk membayar kembali dengan syarat melalui suatu perjanjian utang piutang di antara kreditur dan debitur.⁶ Perjanjian kredit yang dibuat oleh bank kepada debitur merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pemberian kredit. Perjanjian kredit merupakan ikatan antara kreditur dan debitur yang isinya menentukan dan mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak sehubungan dengan pemberian kredit.

Menurut bentuk dan sifatnya, jaminan terbagi menjadi dua yaitu jaminan yang bersifat kebendaan dan jaminan yang bersifat perorangan. Jaminan Perorangan adalah jaminan seorang pihak ketiga yang bertindak untuk menjamin dipenuhinya kewajiban – kewajiban dari debitur. sedangkan Jaminan kebendaan merupakan suatu tindakan berupa suatu penjaminan yang dilakukan oleh kreditur terhadap debiturnya atau antara kreditur dengan pihak ketiga guna menjamin dipenuhinya kewajiban dari debitur.⁷

Ada beberapa macam jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum. pertama adalah jaminan dalam bentuk gadai yang diatur dalam pasal 1150 sampai dengan pasal 1160 KUHPer. Gadai, sesuai dengan pengertian yang diberikan dalam KUHPer, merupakan jaminan dalam bentuk kendaraan bergerak yang

⁵ M.Bahsan.op.cit,h. 4

⁶ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h.1.

⁷ Hermansyah, op.cit,h.74

pelaksanaanya dilakukan dengancara penyerahan kebendaan bergerak tersebut ketangan kreditor. Kedua adalah Hipotek yang diatur dalam pasal 1162 hingga pasal 1178 KUHPer. Dalam hipotek yang menjadi jaminan adalah barang tidak bergerak yang dibuat dengan akta hipotek. Ketiga adalah Hak tanggungan yang diatur dalam UU No. 4 Tahun 1996 yang mengatur mengenai pinjaman atas hak – hak tanah tertentu berikut kebendaan yang dianggap melekat dan diperuntukan untuk dipergunakan secara bersama – sama dengan bidang tanah yang diatasnya terdapat hak – hak tanah yang dapat dijaminakan dengan hak tanggungan. Dan yang keempat adalah Jaminan Fidusia, sebelum diatur dalam undang – undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia eksistensi fidusia sebagai jaminan diakui berdsarkan yurisprudensi. Konstruksi fidusia berdasarkan yurisprudensi yang pernah ada adalah penyerahan hak milik secara kepercayaan atas kebendaan atau barang – barang bergerak milik debitor kepada kreditor dengan penguasaan fisik barang tersebut tetap berada pada debitor dengan ketentuan bahwa jika debitor melunasi utangnya sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan tanpa wanprestasi,maka kreditor berkewajiban untuk mengembalikan hak milik atas barang tersebut kepada debitor. Dalam khasanah ilmu hukum penyerahan kebendaan seperti ini dinamakan *constitutum prossessorium*.⁸ *constitutum prossessorium* adalah suatu keadaan dimana benda tetap dikuasai si debitor walaupun hak milik atas benda tersebut telah berpindah ke tangan kreditor.⁹

⁸ Gunawan wijaja dan Ahmad yani, op.cit,h.5.

⁹ Regar, *Rechten*, Regehegar.blogspot.com, Tanggal akses 03 Oktober 2013.

Ketentuan Pasal 1 butir 2 Undang-undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya ditulis UUJF) menyatakan bahwa :

“ Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang No.4 tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberian fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap krediturnya”.¹⁰

Unsur – unsur jaminan fidusia adalah :

1. adanya hak jaminan
2. adanya objek, yaitu benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan
3. benda jaminan fidusia tetap berada dalam penguasaan debitur
4. memberikan kedudukan utama kepada kreditur.¹¹

Pemberian jaminan fidusia selalu berupa penyediaan bagian dari harta kekayaan sipemberi fidusia untuk pemenuhan kewajibannya, artinya pemberi fidusia telah melepaskan hak kepemilikan secara yuridis untuk sementara waktu. Menurut Subekti, memberikan suatu barang sebagai jaminan kredit berarti melepaskan sebagian kekuasaan atas barang tersebut. Kekuasaan yang dimaksud

¹⁰ Pasal 1 Ayat 2 Undang – Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

¹¹ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*,(Jakarta: Rajawali Press, 2000), h.57

bukanlah melepaskan kekuasaan benda secara ekonomis melainkan secara yuridis.¹²

Penerima Fidusia memperjanjikan bahwa, ia atau kuasanya sewaktu waktu berhak untuk melihat adanya dan keadaan dari benda fidusia, dan melakukan atau suruh melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh Pemberi Fidusia, kalau ia lalai untuk melakukannya, kesemuanya atas beban dan tanggungan Pemberi Fidusia.

Sebelum bank menyetujui melakukan perjanjian kredit, bank harus berpedoman kepada prinsip (5C) yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition*, secara selektif terhadap calon debitur sehingga terhindar dari kesalahan-kesalahan yang memungkinkan terjadi wanprestasi kemudian dapat memungkinkan terjadi kredit macet dan kerugian antara kedua belah pihak dan juga dapat memberikan syarat-syarat yang diperlukan kepada pihak debitur untuk melindungi hak atau kepentingan pihak bank apabila suatu hari nanti terjadi wanprestasi.¹³

Adapun yang dimaksud dengan prinsip 5 (lima) C tersebut ialah sebagai berikut :

1. *Character* (watak), yaitu sifat dasar yang ada dalam hati seseorang. Watak merupakan bahan pertimbangan untuk mengetahui resiko. Tidak mudah untuk

¹² Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia (Suatu kebutuhan yang didambakan)*, (Bandung: Alumni, 2004), h.22.

¹³ Hendy, *Prinsip Pemberian Kredit*, <http://ngenyiz.blogspot.com/2009/02/prinsip-pemberian-kredit-5c-principle.html>, Tanggal akses 22 April 2013.

menentukan watak seorang debitur apalagi debitur yang baru pertama kali mengajukan permohonan kredit.

2. *Capital* (modal), seseorang atau badan usaha yang akan menjalankan badan usaha atau bisnis sangat memerlukan modal untuk memperlancar kegiatan bisnisnya.
3. *Capacity* (kemampuan), untuk memenuhi kewajiban pembayaran debitur harus memiliki kemampuan yang memadai yang berasal dari pendapatan pribadi / pendapatan perusahaan.
4. *Collateral* (jaminan), jaminan berguna untuk memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dari barang – barang jaminan tersebut bilamana debitur tidak dapat melunasi hutangnya pada jangka waktu yang telah di tentukan dalam perjanjian.
5. *Condition* (kondisi), kondisi ekonomi dapat mempengaruhi kemampuan debitur mengembalikan hutangnya sering sulit untuk diprediksi.¹⁴

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Pekanbaru adalah salah satu lembaga keuangan dalam bentuk bank, yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam berbagai macam fasilitas kredit, yang merupakan jenis pembiayaan secara umum.

Kegiatan penyaluran kredit mengandung resiko yang dapat mempengaruhi kesehatan dan kelangsungan usaha bank, dikarenakan adanya kredit macet.

¹⁴ Sutarno, *Aspek – Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 93

Pelaksanaan pemberian kredit pada umumnya, dilakukan dengan dibuatnya suatu perjanjian. Perjanjian tersebut terdiri dari perjanjian pokok, yaitu perjanjian utang-piutang dan setelah itu dilanjutkan dengan perjanjian tambahan yaitu berupa perjanjian pemberian jaminan oleh pihak debitur.

Dalam penelitian ini penulis mengambil perjanjian kredit yang diikat dengan jaminan fidusia, perjanjian kredit yang diikat dengan jaminan fidusia ini merupakan kredit usaha kecil / mikro. Dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pinjaman yang bisa dipinjam oleh debitur harus kurang dari nilai jaminan fidusia atau sekitar 75% dari nominal uang yang akan dipinjam. Kredit akan mulai dihitung pada saat tanggal pencairan dana kredit. Dan apabila debitur terlambat dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar maka akan dikenakan denda keterlambatan.

Dalam pemberian kredit kepada nasabah, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Pekanbaru pasti akan menghadapi resiko-resiko yang timbul dalam perjanjian tersebut, misalnya terjadi kredit macet yang disebabkan oleh beberapa alasan. Kredit macet yang terjadi pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. di Pekanbaru tidak semuanya dapat terselesaikan dengan baik, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pimpinan kredit pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Pekanbaru ada sekitar 3,41% kredit yang tidak terbayarkan. Hal ini tentu saja merugikan pihak bank.¹⁵

¹⁵ Wawancara dengan Pimpinan Kredit Mikro Bank Mandiri Bpk. M.Adil Yusrizal pada 22 April 2013.

Wanprestasi dalam perjanjian kredit sering dialami oleh debitur yang melakukan kredit untuk usaha kecil dan menengah (UKM). Hal ini terjadi karna sifat usaha kecil dan menengah yang lemah dalam manajemen.¹⁶ Meskipun Bank telah melakukan upaya untuk menyelesaikan permasalahan kredit tersebut, tetapi tetap saja belum bisa terselesaikan dengan baik. Seperti yang telah penulis kemukakan diatas ada sekitar 3,41% dana yang tidak terbayarkan yang akhirnya akan menimbulkan kerugian dari pihak bank.

Berdasarkan uraian yang penulis paparkan diatas, maka penulis tertarik untuk membuat penelitian skripsi dengan judul “ **PENYELESAIAN KREDIT MACET DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk. PEKANBARU** ”.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, maka penulis akan mengambil batasan masalah yang akan diteliti. Adapun penelitian ini difokuskan pada penyelesaian kredit macet dengan jaminan fidusia di Bank Mandiri Pekanbaru.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya kredit macet pada PT. Bank Mandiri ?

¹⁶ Anne, *Kredit Macet Perbankan*, <http://www.anneahira.com/kredit-macet-dan-permasalahannya.html>. Tanggal akses 28 Mei 2013.

2. Bagaimana bentuk penyelesaian yang dilakukan bank Mandiri apabila terjadi kredit macet dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia ?
3. Bagaimana proses eksekusi jaminan fidusia dalam penyelesaian kredit macet tersebut ?

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kredit macet di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Pekanbaru.
 - b. Untuk mengetahui bentuk penyelesaian yang dilakukan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Pekanbaru apabila terjadi kredit macet dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia.
 - c. Untuk mengetahui proses eksekusi jaminan fidusia dalam penyelesaian kredit macet.
2. Kegunaan Penelitian ini adalah sebagai berikut :
 - a. Kegunaan Teoritis
 Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Jaminan, khususnya tentang Fidusia di Indonesia.
 - b. Kegunaan Praktis
 Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat luas dan praktisi hukum serta khususnya praktisi perbankan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian empiris atau penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian hukum yang memperoleh data dari sumber data primer.¹⁷ Sifat dari penelitian ini adalah penelitian deskriptif - analitis, yaitu dimaksudkan untuk memberi data yang seteliti dan sedetail mungkin tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya.¹⁸

2. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini seperti pimpinan kredit, mikro kredit analis, dan debitur yang wanprestasi.
- b. Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah perjanjian kredit dengan jaminan fidusia.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah data Primer dan data sekunder, sebagai berikut :

1. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung di lapangan yang dalam hal ini diperoleh dari wawancara yaitu cara memperoleh informasi dengan cara bertanya langsung pada pihak – pihak yang terkait dalam penelitian ini.
2. Data Sekunder adalah data yang mendukung keterangan dan menunjang kelengkapan data primer yang terdiri dari :
 - 1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

¹⁷ Soejono dan Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003) ,h.56.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pres, 1986), h, 6.

- 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
- 3) Buku-buku, literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini;
- 4) Dokumen perjanjian fidusia;
- 5) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan informasi tentang data primer dan data sekunder, seperti kamus hukum, bahan bacaan yang bersumber dari internet.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh gejala atau seluruh unit yang akan diteliti. Oleh karena populasi biasanya sangat besar dan luas, maka seringkali tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu tetapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel yang memberikan gambaran tentang objek penelitian secara tepat dan benar.¹⁹

Populasi dalam penelitian ini adalah semua pihak yang terkait dengan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Pekanbaru. Dalam hal ini ialah pimpinan kredit, kredit analis dan debitur yang wanprestasi. Jumlah debitur ada 96 orang. dan penulis akan mengambil sampel debitur yang mengalami kredit macet. Mengingat banyaknya jumlah populasi dalam penelitian ini maka tidak semua populasi diteliti secara keseluruhan, untuk

¹⁹ Ronny Hanityo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994), h. 34.

itu diambil sampel dari populasi secara *Purposive Sampling*.²⁰ Debitur yang mengalami kredit macet sebanyak 20 orang, namun penulis akan mengambil 50 % dari jumlah debitur yang kredit macet yakni 10 orang.

b. Sampel

Penentuan sampel dilakukan berdasarkan *purposive sampling*, yang artinya sampel telah ditentukan dahulu berdasar objek yang diteliti. Yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah pimpinan kredit, kredit analis dan debitur yang mengalami kredit macet.

Tabel 1.1

Daftar Populasi Dan Sampel

No	Populasi	Sampel
1.	Pimpinan Kredit	1 Orang
2.	Mikro Kredit Analis	1 Orang
3.	Debitur Wanprestasi	10 Orang
Jumlah		11 Orang

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara, yaitu cara memperoleh informasi dengan bertanya langsung dan dengan membuat beberapa pertanyaan yang akan dijadikan sebagai pedoman wawancara yang ditujukan kepada pihak-pihak yang diwawancarai terutama orang-orang yang berwenang, mengetahui dan terkait dengan penyelesaian kredit macet dengan jaminan fidusia.

²⁰ Ibid., h.51.

- b. Studi kepustakaan yaitu dengan membaca buku – buku, literatur, peraturan perundang – undangan dan data sekunder lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

6. Analisa Data

Setelah data-data tersebut terkumpul, maka akan diinventarisasi dan kemudian di seleksi yang sesuai, untuk digunakan menjawab pokok permasalahan penelitian ini. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif, untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

Dalam menganalisis data penelitian ini dipergunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²¹

F. Sistematika Penulisan

Dalam Penelitian ini penulis membagi sistematis penulisan dalam 5 bab yaitu:

BAB I : Bab pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

²¹ Ibid., h.8

BAB II : Bab ini merupakan gambaran umum tentang Bank Mandiri Pekanbaru. Yang terdiri dari profil Bank Mandiri Pekanbaru, Sejarah berdirinya Bank Mandiri Pekanbaru, Visi dan Misi Bank Mandiri Pekanbaru, Strategi dan Tujuan.

BAB III : Bab ini merupakan tinjauan umum tentang perjanjian yaitu pengertian perjanjian, syarat sahnya perjanjian, unsur perjanjian, asas perjanjian, pengertian perjanjian kredit, bentuk perjanjian kredit, dan tinjauan umum tentang jaminan fidusia yang terdiri dari pengertian jaminan fidusia, subjek dan objek jaminan fidusia, dan eksekusi jaminan fidusia.

BAB IV : Bab ini merupakan pembahasan dan hasil penelitian yaitu faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet, bentuk penyelesaian kredit macet dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, proses eksekusi jaminan fidusia dalam penyelesaian kredit macet.

BAB V : Bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

Daftar Pustaka

Lampiran

BAB II

GAMBARAN UMUM

A. Profil Bank Mandiri

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Pekanbaru didirikan pada tanggal 2 Oktober 1998 yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman No. 140 Pekanbaru. Bank Mandiri merupakan bagian dari program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan Pemerintah Indonesia. Bank mandiri merupakan gabungan empat bank milik pemerintah yaitu Bank Ekspor Impor, Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, dan Bank Pembangunan Indonesia yang dilebur menjadi Bank Mandiri.

Segera setelah merger, Bank Mandiri melaksanakan proses konsolidasi secara menyeluruh termasuk pengurangan cabang dan pegawai. Selanjutnya diikuti dengan peluncuran single brand di seluruh jaringan melalui iklan dan promosi.

Modal dari Bank Mandiri berasal dari Pemerintah dan Publik yang mana nilai sahamnya adalah 70% milik Pemerintah dan 30% dari publik. Jadi Bank Mandiri ini adalah Badan Usaha Milik Negara karna sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah. Laba bersih yang dimiliki Bank Mandir per tahun 2012 adalah sebesar Rp. 15,5 Triliun.

B. Visi Dan Misi Bank Mandiri

1. Visi

Menjadi lembaga keuangan Indonesia yang dikagumi dan selalu progresif.

2. Misi

- a. Berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pasar;
- b. Mengembangkan sumber daya manusia professional;
- c. Memberi keuntungan yang maksimal bagi *stakeholder*;
- d. Melaksanakan manajemen terbuka;
- e. Peduli terhadap kepentingan masyarakat dan lingkungan.

C. Strategi Dan Tujuan

1. Strategi

- a. Menyelesaikan permasalahan kredit bermasalah (NPL) dan melakukan konsolidasi bisnis *Corporate Banking*.
- b. Memperbaiki image perusahaan, meningkatkan penerapan *Good Corporate Governance* dan memperkuat kapabilitas.
- c. Melanjutkan pengembangan bisnis pada seluruh segmen yang telah ditetapkan .
- d. Meningkatkan efisiensi operasional.
- e. Meningkatkan profesionalisme SDM melalui penerapan *corporate values, performance culture, sales & risk culture*.

2. Tujuan

Turut melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya di bidang perbankan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Bank Mandiri berkomitmen membangun hubungan jangka panjang yang didasari atas kepercayaan baik dengan nasabah bisnis maupun perseorangan. Bank Mandiri melayani seluruh nasabah dengan standar layanan internasional melalui penyediaan solusi keuangan yang inovatif. Bank Mandiri ingin dikenal karena kinerja, sumber daya manusia dan kerjasama tim yang terbaik.

Dengan mewujudkan pertumbuhan dan kesuksesan bagi pelanggan, Bank Mandiri mengambil peran aktif dalam mendorong pertumbuhan jangka panjang Indonesia dan selalu menghasilkan imbal balik yang tinggi secara konsisten bagi pemegang saham.

BAB III

TINJAUAN UMUM

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah suatu hal yang sangat penting, karna menyangkut kepentingan parapihak yang membuatnya. Oleh karna itu hendaknya setiap perjanjian dibuat secara tertulis agar diperoleh sesuatu kekuatan hukum, sehingga tujuan akan adanya kepastian hukum dapat tercapai.

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata dinyatakan bahwa :

“ Suatu perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih ”.²²

Menurut R. Setiawan, rumusan pasal 1313 KUH Perdata tersebut masih kurang lengkap, karna hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja dan juga sangat luas karna dengan di pergunakannya kata perbuatan tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum, sehingga beliau memberikan defenisi sebagai berikut :²³

- a. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum;
- b. Menambahkan perkataan “ atau saling mengikatkan dirinya ” dalam Pasal 1313 KUH Perdata.

²² Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

²³ R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Bina Cipta, 1994), h.49.

Sehingga menurut beliau rumusan perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu atau lebih.

Menurut Rutten, rumusan perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata mengandung beberapa kelemahan, karna hanya mengatur perjanjian sepihak saja dan juga sangat luas, sebab istilah perbuatan yang dipakai akan mencakup juga perbuatan melawan hukum.²⁴

Berdasarkan beberapa rumusan mengenai pengertian perjanjian seperti tersebut diatas, jika disimpulkan maka perjanjian itu mempunyai unsur-unsur yang terdiri dari :²⁵

- a. Adanya pihak-pihak;
- b. Adanya persetujuan pihak-pihak;
- c. Adanya tujuan yang akan dicapai;
- d. Adanya prestasi yang akan dilaksanakan;
- e. Adanya bentuk tertentu yaitu lisan atau tertulis;
- f. Adanya syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian.

2. Syarat –Syarat Sahnya Suatu Perjanjian.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, untuk syarat sahnya suatu perjanjian adalah bahwa para pihak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri.

²⁴ Purwahid Patrik, *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, (Bandung: manjur Maju, 1994), h.46.

²⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), h79.

Kedua subjek yang mengadakan perjanjian harus bersepakat mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan. Sepakat mengandung arti, bahwa apa yang dikehendaki pihak yang satu juga dikehendaki pihak yang lain.

b. Kecakapan para pihak yang membuat suatu perjanjian.

Cakap artinya bahwa orang-orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Seorang yang telah dewasa, sehat jasmani serta rohani dianggap cakap oleh hukum, sehingga dapat membuat suatu perjanjian. Orang yang tidak cakap menurut hukum ditentukan dalam pasal 1330 KUH Perdata, yaitu :

- 1) Orang yang belum dewasa;
- 2) Orang yang dibawah pengampuan.

c. Suatu hal tertentu.

Suatu perjanjian harus secara jelas mengenai suatu hal atau objek tertentu, artinya dalam membuat perjanjian objek terdiri dari perjanjian harus disebutkan dengan jelas, sehingga hak dan kewajiban para pihak bisa ditetapkan.

d. Suatu sebab yang halal.

Suatu perjanjian adalah dianggap sah apabila tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

3. Asas-asas Perjanjian

Menurut ketentuan hukum yang berlaku, asas-asas penting dalam suatu perjanjian adalah sebagai berikut :²⁶

a. Asas kebebasan berkontrak

Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi :

“ Semua persetujuan yang dibuat merupakan Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya ”.²⁷

Tujuan dari Pasal diatas adalah bahwa pada umumnya suatu perjanjian itu dapat dibuat secara bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun, bebas untuk menentukan bentuknya maupun syarat-syaratnya, bebas untuk menentukan bentuknya yaitu tertulis atau tidak tertulis dan seterusnya.

Jadi berdasarkan ketentuan Pasal tersebut dapat disimpulkan, bahwa masyarakat diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja dan perjanjian itu mengikuti mereka yang membuatnya, suatu Undang-Undang. kebebasan berkontrak dari para pihak untuk membuat perjanjian itu meliputi :

- 1) Perjanjian yang telah diatur Undang-Undang;
- 2) Perjanjian-perjanjian baru atau campuran dari sesuatu yang belum diatur dalam Undang-Undang.

b. Asas konsensualisme

²⁶ A Qiram Syamsudin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), h. 20

²⁷ Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Adalah suatu perjanjian yang dianggap telah cukup jika terdapat kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian itu tanpa diikuti dengan perbuatan hukum lain kecuali perjanjian yang berisi format.

c. Asas itikad baik.

Bahwa orang yang akan membuat perjanjian harus dilandasi dengan itikad baik. Itikad baik dalam pengertian subjektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang yaitu apa yang terletak pada seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum. Sedangkan itikad baik dalam pengertian objektif adalah bahwa pelaksanaan suatu perjanjian hukum harus didasarkan pada norma kepatuhan atau apa-apa yang dirasa sesuai dengan yang patut dalam masyarakat.

d. Asas *Pacta Sun Servanda*

Merupakan asas dalam perjanjian yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat badi mereka yang membuat perjanjian tersebut berlaku seperti Undang-Undang. Dengan demikian para pihak tidak mendapat kerugian karna perbuatan mereka dan juga tidak mendapatkan keuntungan darinya, kecuali jika perjanjian-perjanjian tersebut dimaksudkan untuk pihak ketiga. Maksud dari asas ini dalam perjanjian tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak yang telah membuat perjanjian itu.

e. Asas berlakunya suatu perjanjian.

Pada dasarnya semua perjanjian itu berlaku bagi mereka yang membuatnya, tidak ada pengaruhnya bagi pihak lain (pihak ketiga), kecuali

yang telah diatur dalam Undang-Undang. misalnya perjanjian untuk pihak ketiga. Asas berlakunya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1315 KUH Perdata, yang berbunyi

“ Pada umumnya tidak seorangpundapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu perjanjian dari pada dirinya sendiri ”.²⁸

4. Pengertian Kredit

Pengertian kredit sendiri sebenarnya berasal dari bahasa Romawi yaitu *Credere* yang berarti percaya atau *credo* atau *creditum* yang berarti saya percaya. Jadi seseorang yang telah menyatakan kepercayaan dari kreditur.²⁹

Kredit juga berarti meminjamkan uang atau pemindahan pembayaran, apabila orang menyatakan membeli secara kredit maka hal ini berarti si pembeli tidak harus membayarnya pada saat itu juga.³⁰ Kredit menurut ketentuan Undang-Undang Perbankan yaitu Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, Pasal 1 angka 11 menyatakan :

“ Kedit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”³¹

Apabila diartikan secara ekonomi, kredit berarti “penundaan pembayaran” artinya uang atau barang yang diterima sekarang akan dikembalikan pada masa

²⁸ Pasal 1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

²⁹ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, (Bandung: Alumni, 1983), h. 4.

³⁰ Budi Untung, *Kredit Perbankan Indonesia*, (Yogyakarta: Andi, 2000), h. 1.

³¹ Pasal 1 Ayat 11 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

yang akan datang. Bisa 1 minggu 1 bulan bahkan beberapa tahun. Oleh karena itu dalam pemberian kredit selalu terkandung resiko, yaitu resiko bagi pemberi kredit bahwa uang atau barang yang telah diberikan kepada penerima kredit tidak kembali sepenuhnya. Dalam ruang lingkup kredit maka kontra prestasi yang akan diterima kreditur berupa sejumlah nilai ekonomi tertentu yang dapat berupa uang, barang, dan sebagainya. Dengan kondisi demikian maka tidak berlebihan apabila dari konteks ekonomi kredit mempunyai pengertian sebagai suatu penundaan pembayaran dari prestasi yang diberikan sekarang dimana prestasi yang diberikan sekarang, dimana prestasi tersebut pada dasarnya akan berbentuk nilai uang.³²

Kredit dalam kegiatan perbankan merupakan kegiatan usaha yang paling utama, karna penghasilan terbesar dari suatu usaha bank berasal dari pendapatan usaha kredit yaitu berupa bunga dan provisi.

Kewajiban adanya pedoman perkreditan pada setiap bank, dilandasi oleh dasar hukum yang kuat, yaitu Pasal 29 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang berbunyi :

“ Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya pada bank ”.³³

Ketentuan tersebut berakar dari adanya rasa saling percaya diantara kedua belah pihak, yaitu antara pihak bank dan nasabahnya. Bank sebagai pengelola

³² Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h. 368.

³³ Pasal 29 Ayat 3 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

dana dari pihak ketiga harus menjaga kinerja dan kesehatan bank agar kepentingan dan kepercayaan masyarakat tetap terjaga.

5. Pengertian Perjanjian Kredit

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana dua orang atau dua pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hal atau suatu persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.³⁴

Perjanjian Kredit merupakan perikatan antara dua pihak atau lebih yang menggunakan uang sebagai obyek dari perjanjian, jadi dalam perjanjian kredit ini titik beratnya adalah pemenuhan prestasi antara pihak yang menggunakan uang sebagai obyek atau sesuatu yang dipersamakan dengan uang.

Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat riil. Sebagaimana perjanjian prinsipil, maka perjanjian jaminan adalah assessor-nya. Ada atau berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok. Arti riil ialah bahwa perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah kreditur.³⁵

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan tidak mengenal istilah perjanjian kredit. Istilah perjanjian kredit ditemukan dalam Instruksi Presidium Kabinet Nomor 15/EK/10 tanggal 3 Oktober 1966 Jo Surat Edaran Bank Indonesia Unit I Nomor 2/539/UPK/Pemb tanggal 8 Oktober 1966

³⁴ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006), h. 71.

³⁵ Ibid.,

yang menginstruksikan kepada masyarakat perbankan bahwa dalam memberikan kredit dalam bentuk apapun bank-bank wajib mempergunakan perjanjian kredit.

Dalam setiap pembuatan perjanjian kredit terdapat beberapa judul, dan dalam praktek perbankan tidak sama antara bank yang satu dengan bank yang lain. Ada yang menggunakan judul perjanjian kredit, akad kredit, persetujuan pinjam uang, persetujuan membuka kredit dan lain sebagainya. Walaupun judul dari perjanjian tersebut berbeda-beda tetapi secara yuridis isi perjanjian pada umumnya sama, yaitu memberikan pinjaman berbentuk uang.³⁶

6. Bentuk Perjanjian kredit

Menurut hukum, perjanjian kredit dapat dibuat secara lisan atau tertulis yang penting memenuhi syarat-syarat Pasal 1320 KUH Perdata. Namun dari sudut pembuktian perjanjian secara lisan sulit untuk dijadikan sebagai alat bukti, karena hakekat pembuatan perjanjian adalah sebagai alat bukti bagi para pihak yang membuatnya. Dalam dunia modern yang kompleks ini perjanjian lisan tentu sudah dapat disarankan untuk tidak digunakan meskipun secara teori diperbolehkan karena lisan sulit dijadikan sebagai alat pembuktian bila terjadi masalah di kemudian hari. Untuk itu setiap transaksi apapun harus dibuat tertulis yang digunakan sebagai alat bukti. Kita menyimpan tabungan atau deposito di bank maka akan memperoleh buku tabungan atau bilyet deposito sebagai alat bukti. Untuk pemberian kredit perlu dibuat perjanjian kredit sebagai alat bukti. Dasar hukum perjanjian kredit secara tertulis dapat mengacu pada Pasal 1 ayat 11 UU

³⁶ Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Bank*, (Bandung: Alfabeta, 2003) ,h.97.

No 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No 7 tahun 1992 tentang perbankan. Dalam Pasal itu terdapat kata-kata penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain. Kalimat tersebut menunjukkan bahwa pemberian kredit harus dibuat perjanjian. Meskipun dalam pasal itu tidak ada penekanan perjanjian kredit harus dibuat secara tertulis namun menurut pendapat penulis dalam organisasi bisnis modern dan mapan maka untuk kepentingan administrasi yang rapi dan teratur dan demi kepentingan pembuktian sehingga pembuktian tertulis dari suatu perbuatan hukum menjadi suatu keharusan, maka kesepakatan perjanjian kredit harus tertulis.

Dasar hukum lain yang mengharuskan perjanjian kredit harus tertulis adalah instruksi Presidium Kabinet No 15/EK/IN/10/1966 tanggal 10 Oktober 1966. Dalam instruksi tersebut ditegaskan “dilarang melakukan pemberian kredit tanpa adanya perjanjian kredit yang jelas antara bank dengan debitur atau antara bank sentral dan bank-bank lainnya”. Surat Bank Indonesia yang ditujukan kepada segenap Bank Devisa No. 03/1093/UPK/KPD tanggal 29 Desember 1970, khususnya butir 4 yang berbunyi untuk pemberian kredit harus dibuat surat perjanjian kredit. Dengan keputusan-keputusan tersebut maka pemberian kredit oleh bank kepada debiturnya menjadi pasti bahwa :

- 1) Perjanjian diberi nama perjanjian kredit;
- 2) Perjanjian kredit harus dibuat secara tertulis.

Perjanjian kredit merupakan ikatan atau bukti tertulis antara bank dengan debitur sehingga harus disusun dan dibuat sedemikian rupa agar setiap orang mudah untuk mengetahui bahwa perjanjian yang dibuat itu merupakan perjanjian

kredit. Perjanjian kredit termasuk salah satu jenis / bentuk akta yang dibuat sebagai alat bukti. Dikatakan salah satu bentuk akta karena masih banyak perjanjian-perjanjian lain yang merupakan akta misalnya perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa dan lain-lain . Dalam praktek bank ada 2 (dua) bentuk perjanjian kredit yaitu:

- 1) Perjanjin kredit yang dibuat di bawah tangan, dinamakan akta dibawah tangan artinya perjanjian yang disiapkan dan dibuat sendiri oleh bank kemudian ditawarkan kepada debitur untuk disepakati. Untuk mempermudah dan mempercepat kerja bank, biasanya bank sudah mempersiapkan formulir perjanjian dalam bentuk standar (*standaardform*) yang isi, syarat-syarat dan ketentuannya disiapkan terlebih dahulu secara lengkap. Bentuk perjanjian kredit yang dibuat sendiri oleh bank termasuk jenis akta dibawah tangan. Dalam rangka penandatanganan perjanjian kredit yang isinya sudah disiapkan oleh bank kemudian disodorkan kepada setiap calon-calon untuk diketahui dan difahami mengenai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam formulir perjanjian kredit tidak pernah memperbincangkan atau dirundingkan atau dinegosiasikan dengan debitur. Calon debitur mau atau tidak mau dengan terpaksa atau suka rela harus menerima semua persyaratan yang tercantum dalam formulir perjanjian kredit. Seandainya calon debitur melakukan protes atau tidak setuju terhadap Pasal-pasal yang tercantum dalam formulir perjanjian kredit, maka kreditur tidak akan menerima protes tersebut karena isi perjanjian memang sudah disiapkan dalam bentuk cetakan oleh lembaga bank itu sehingga bagi petugas bank pun tidak bisa menanggapi usulan calon

debitur. Calon debitur menyetujui atau menyepakati isi perjanjian kredit karena calon debitur dalam posisi yang sangat membutuhkan kredit (posisi lemah) sehingga apapun persyaratan yang tercantum dalam formulir perjanjian kredit calon debitur dapat menyetujui. Perjanjian kredit yang sudah disiapkan oleh bank dalam bentuk standard (standard form)

- 2) Perjanjian kredit yang dibuat oleh dan dihadapan notaris yang dimanakan akta otentik atau akta notariil. Yang menyiapkan dan membuat perjanjian ini adalah notaris namun dalam praktek semua syarat dan ketentuan perjanjian disiapkan oleh bank kemudian diberikan kepada notaris untuk dirumuskan dalam akta notariil. Memang dalam membuat perjanjian hanyalah merumuskan apa yang diinginkan para pihak dalam bentuk akta notariil atau akta otentik. Perumusan kredit yang dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta otentik biasanya untuk pemberian kredit dalam jumlah yang besar dengan jangka waktu menengah atau panjang seperti kredit investasi, kredit modal kerja, kredit sindikasi (kredit yang diberikan lebih dari satu kreditur atau lebih dari satu bank).³⁷

B. Tinjauan Umum Jaminan Fidusia

1. Pengertian Jaminan Fidusia

Dalam rangka pembangunan ekonomi di Indonesia, bidang hukum meminta perhatian yang serius dalam pembinaan hukumnya, diantaranya adalah

³⁷ Ibid., h. 98.

lembaga jaminan. Seiring perkembangan ekonomi dan perdagangan akan diikuti oleh kebutuhan kredit tersebut.

Dengan adanya perkembangan ekonomi dan perdagangan akan selalu diikuti oleh perkembangan kebutuhan akan kredit dan pemberian fasilitas kredit, dan ini akan memerlukan adanya jaminan, hal ini demi keamanan bagi pemberi kredit tersebut. Artinya piutang dari pihak yang meminjamkan akan terjamin dengan adanya jaminan. Disinilah letak pentingnya Lembaga jaminan.³⁸

Jadi dengan adanya jaminan tersebut akan mengurangi risiko yang mungkin terjadi, apabila debitur wanprestasi atau tidak mau membayar pada waktu yang telah ditentukan.

Lembaga jaminan mempunyai tugas melancarkan dan mengamankan pemberian kredit, maka jaminan yang baik (ideal) menurut Soebekti adalah sebagai berikut :

- a. Yang dapat secara mudah membantu perolehan kredit pihak yang memerlukan.
- b. Yang tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pemberi kredit untuk melakukan atau meneruskan usahanya.
- c. Yang memberikan kepastian kepada si pemberi kredit dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu bersedia untuk dieksekusi, yaitu bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi utang si penerima (pengambil) kredit.³⁹

Fidusia berasal dari kata *fides* yang berarti kepercayaan. Sesuai dengan artinya, maka hubungan hukum antara pemberi fidusia (debitur) dan penerima

³⁸ Purwahid Patrik dan Kushadi, *Hukum Jaminan*, (Semarang: Undip Press, 1993), h.3.

³⁹ Soebekti, *Jaminan – jaminan untuk pemberian kredit menurut hukum di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1986), h.29.

fidusia (kreditur) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan. Debitur percaya bahwa kreditur mau mengembalikan hak milik atas barang yang diserahkan setelah dilunasi utangnya. Sebaliknya kreditur percaya bahwa debitur tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya.⁴⁰

Pengertian fidusia menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia adalah Sebagai berikut :

“fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”.⁴¹

Sedangkan pengertian jaminan fidusia menurut Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia adalah sebagai berikut :

“ Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya”.⁴²

Dari pengertian di atas, dapat diketahui unsur-unsur jaminan fidusia meliputi adanya hak jaminan, adanya obyek, yaitu benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, benda yang menjadi obyek jaminan tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, dan memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia.

⁴⁰ Gunawan Wjaya dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 113.

⁴¹ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

⁴² Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Perjanjian Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi prestasi.⁴³

Ada 4 (empat) prinsip utama dari jaminan fidusia yaitu :

1. Bahwa secara riil pemegang fidusia hanya berfungsi sebagai pemegang saja, bukan sebagai pemilik sebenarnya.
2. Hak pemegang fidusia untuk eksekusi barang jaminan baru ada jika wanprestasi terjadi pada pihak debitur.
3. Apabila hutang sudah dilunasi, maka hak objek jaminan fidusia harus dikembalikan kepada pihak pemberi fidusia.
4. Jika hasil penjualan (eksekusi) barang fidusia melebihi hutangnya, maka sisa hasil penjualan harus dikembalikan kepada pemberi fidusia.⁴⁴

Dalam proses terjadinya jaminan fidusia dilaksanakan melalui dua tahap yaitu tahap pembebanan dan tahap pendaftaran fidusia :⁴⁵

a. Pembebanan Jaminan Fidusia

Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaries dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia.

Alasan Undang-Undang menetapkan dengan akta notaries adalah :

⁴³ Purwahid Patrik dan Kushadi, Op.Cit., h. 36.

⁴⁴ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000) , h. 4.

⁴⁵ Purwahid Patrik dan Kashadi, Op. Cit., h. 41.

- 1) Akta notaries adalah akta otentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;
- 2) Objek jaminan fidusia pada umumnya adalah benda bergerak;
- 3) Undang-Undang melarang adanya fidusia ulang.

Dalam akta jaminan fidusia selain dicantumkan hari dan tanggal, juga dicantumkan waktu/jam pembuatan akta tersebut.

Akta jaminan fidusia yang dimaksud sekurang – kurangnya memuat :

- 1) Identitas para pihak pemberi dan penerima fidusia;
Identitas meliputi nama lengkap, agama, tempat tinggal atau kedudukan, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan dan pekerjaan.
- 2) Data perjanjian pokok yang dijamin dengan fidusia Yang dimaksud dengan data perjanjian pokok adalah mengenai macam perjanjian dan utang yang dijamin dengan fidusia.
- 3) Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Uraian mengenai benda objek jaminan fidusia cukup dengan mengidentifikasi benda tersebut, dan dijelaskan mengenai surat bukti kepemilikan.

Dalam hal benda menjadi objek jaminan fidusia merupakan benda dalam persediaan yang selalu berubah-ubah atau tidak tetap, seperti stok bahan baku, atau portofolio perusahaan efek, maka dalam akta jaminan fidusia dicantumkan mengenai jenis, merek, dan kualitas dari benda tersebut.

- 4) Nilai Penjaminan;
- 5) Nilai benda yang dijadikan objek jaminan fidusia.

b. Pendaftaran Jaminan Fidusia

Tujuan pendaftaran fidusia adalah melahirkan jaminan fidusia bagi penerima fidusia, member kepastian kepada debitur mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia dan memberikan hak yang didahulukan terhadap kreditur dan untuk memenuhi asas publisitas karna faktor pendaftaran terbuka untuk umum.⁴⁶

Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan termasuk juga benda yang dibebani dengan jaminan fidusia berada diluar wilayah Negara Indonesia.

Pendaftaran benda yang dibebankan dengan jaminan fidusia dilaksanakan ditempat kedudukan pemberi fidusia, dan pendaftarannya mencakup benda, baik yang berada didalam maupun diluar wilayah Negara Indonesia untuk memenuhi asas publisitas, sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditur lainnya mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia.

Untuk memberikan kepastian hukum, maka Pasal 11 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jamian Fidusia mewajibkan benda yang dibebani jaminan fidusia didaftarkan pada Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Permohonan pendaftaran jaminan fidusia tersebut dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan jaminan fidusia.

Pembebanan kebendaan dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia. Ketentuan ini dimaksudkan agar kantor Pendaftaran Fidusia tidak melakukan penilaian terhadap kebenaran yang dicantumkan dalam

⁴⁶ Ibid., h. 43.

pernyataan pendaftaran fidusia akan tetapi harus melakukan pengecekan data yang dimuat dalam pendaftaran fidusia. Tanggal jaminan fidusia yang termuat dalam Buku Daftar Fidusia ini dianggap sebagai saat lahirnya jaminan fidusia.

2. Objek dan Subjek Jaminan Fidusia

a. Objek Jaminan Fidusia

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan, benda dalam dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor.

Namun dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, yang dapat menjadi objek jaminan fidusia diatur dalam Pasal 1 ayat (4), Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, benda-benda yang menjadi objek jaminan fidusia adalah:

1. Benda yang dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum;
2. Dapat berupa benda berwujud;
3. Benda berwujud termasuk piutang;
4. Benda bergerak;
5. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan Hak Tanggungan ataupun hipotek;
6. Baik benda yang ada ataupun akan diperoleh kemudian;
7. Dapat atas satu satuan jenis benda;
8. Dapat juga atas lebih dari satu satuan jenis benda;

9. Termasuk hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia;

10. Benda persediaan.⁴⁷

Yang dimaksud dengan bangunan yang tidak dapat dibebani dengan Hak Tanggungan disini dalam kaitannya dengan rumah susun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun.

Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia harus disebut dengan jelas dalam akta jaminan fidusia, baik identifikasi benda tersebut maupun penjelasan surat bukti kepemilikannya dan bagi benda *inventory* yang selalu berubah-ubah dan atau tetap harus dijelaskan jenis benda dan kualitasnya.

b. Subjek Jaminan Fidusia

Subjek jaminan fidusia adalah pihak – pihak yang terlibat dalam pembuatan perjanjian/akta jaminan fidusia, yaitu pemberi fidusia dan penerima fidusia.⁴⁸

Pemberi fidusia adalah orang perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia. pemberi fidusia bisa debitur sendiri atau pihak lain yang bukan debitur. Korporasi adalah suatu badan usaha yang berbadan hukum atau bukan badan usaha yang berbadan hukum. Untuk membuktikan bahwa benda yang menjadi objek jaminan fidusia milik sah dari pemberi fidusia, maka harus dilihat bukti-bukti kepemilikan benda-benda jaminan tersebut.

Sedangkan penerima fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai pihak yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan

⁴⁷ Ibid., h. 23.

⁴⁸ Purwahid Patrik dan Kashadi, Op., Cit, h.40.

jaminan fidusia. Korporasi disini adalah badan usaha yang berbadan hukum yang memiliki usaha dibidang pinjam meminjan uang seperti perbankan.

Jadi, penerima fidusia adalah kreditur, bisa bank sebagai pemberi kredit atau orang-perorangan atau badan hukum yang member pinjaman. Penerima fidusia memiliki hak untuk mendapatkan pelunasan utang yang diambil dari nilai objek fidusia dengan cara menjual sendiri olrhkreditur atau melalui pelelangan umum.

Berikut ini hak dan kewajiban Pemberi fidusia :

Hak Pemberi Fidusia :

1. Menguasai benda fidusia dan dapat mengalihkan benda persediaan;
2. Menerima sisa hasil penjualan benda fidusia;
3. Menerima kembali hak milik atas benda fidusia , jika telah melunasi utangnya.

Kewajiban Pemberi Fidusia :

1. Menjaga dan merawat benda fidusia agar tidak turun nilainya;
2. Melaporkan keadaan benda fidusia kepada penerima fidusia;
3. Melunasi utangnya.

Hak Penerima Fidusia :

1. Mengawasi dan mengontrol benda fidusia;
2. Menjual benda fidusia jika debitor wanprestasi;
3. Mengambil piutangnya dari hasil penjualan benda fidusia;
4. Memindahkan benda fidusia, jika benda fidusia tidak dirawat pemberi fidusia.

Kewajiban Penerima Fidusia :

1. Melaksanakan pendaftaran Akta jaminan Fidusia ke Kantor Pendaftaran fidusia;
2. Memberikan kekuasaan kepada pemberi fidusia atas benda fidusia secara pinjam pakai;
3. Menyerahkan kelebihanannya kepada pemberi fidusia;
4. Menyerahkan kembali hak milik atas benda fidusia kepada pemberi fidusia, jika piutangnya telah dilunasi oleh debitor.⁴⁹

3. Eksekusi Jaminan Fidusia

Salah satu ciri dari jaminan hutang kebendaan yang baik adalah manakala jaminan tersebut dapat dieksekusi secara cepat dengan proses yang sederhana, efisien dan mengandung kepastian hukum. Tentu saja Fidusia sebagai salah satu jenis jaminan hutang juga harus memiliki unsur-unsur cepat, murah dan pasti tersebut. Karena selama ini tidak ada kejelasan mengenai bagaimana caranya mengeksekusi fidusia.⁵⁰

Eksekusi ini dapat pula diartikan “menjalankan putusan” pengadilan yang melaksanakan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankannya secara sukarela. Eksekusi dapat dilakukan apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁵¹

⁴⁹ Ibid., h. 97.

⁵⁰ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op. Cit*, hal. 149-150.

⁵¹ Munir Fuady, *Op. Cit*, hal. 57.

Dalam Pasal 15 Ayat 1 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dicantumkan bahwa dalam sertifikat jaminan fidusia dicantumkan kata-kata “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”. Irah-irah tersebut yang memberikan kekuatan eksekutorial pada sertifikat jaminan fidusia, oleh karena itu dipersamakan dengan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Artinya sertifikat jaminan fidusia dapat langsung dieksekusi tanpa melalui proses persidangan dan pemeriksaan melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.

Apabila debitur cidera janji, maka penerima fidusia berhak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan atas kekuasaannya sendiri. Ini merupakan salah satu ciri jaminan kebendaan, yaitu adanya kemudahan dalam pelaksanaan eksekusinya. Undang-Undang Jaminan Fidusia memberikan kemudahan melaksanakan eksekusi melalui lembaga paate eksekusi secara khusus. Kemudahan dalam pelaksanaan eksekusi ini tidak semata-mata monopoli jaminan fidusia, karena dalam gadai juga dikenal lembaga serupa.

Pasal 29 Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara :

- a. Pelaksanaan title eksekutorial oleh penerimaa fidusia;

Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia diatur secara khusus tentang eksekusi jaminan fidusia yaitu melakukan parate eksekusi. Parate eksekusi adalah melakukan sendiri eksekusi tanpa bantuan atau campur tangan

pengadilan. Parate eksekusi dalam hukum jaminan semula hanya diberikan kepada kreditur penerima hipotik dan kepada penerima gadai.

Dalam berbagai hukum jaminan terdapat beberapa macam parate eksekusi, diantaranya parate eksekusi penerima hipotik pertama, parate eksekusi penerima hak tanggungan pertama, parate eksekusi penerima gadai, parate eksekusi penerima fidusia dan parate eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara untuk bank Pemerintah.

- b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;

Prinsipnya adalah penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia harus melalui pelelangan umum, karena dengan cara ini diharapkan dapat diperoleh harga yang paling tinggi. Namun demikian, dalam hal penjualan melalui pelelangan umum diperkirakan tidak akan menghasilkan harga tertinggi yang menguntungkan baik bagi pemberi maupun penerima fidusia, maka dimungkinkan dilakukan penjualan dibawah tangan asal saja hal tersebut disepakati oleh pemberi dan penerima fidusia serta syarat jangka waktu pelaksanaan penjualan tersebut terpenuhi.

- c. Penjualan dibawah tangan.

Pelaksanaan penjualan dibawah tangan dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak dilakukan setelah waktu satu bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan penerima

fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam dua surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan. Jadi pada prinsipnya pelaksanaan penjualan dibawah tang dilakukan oleh pemberi fidusia sendiri, selanjutnya hasil penjualan disearahkan kepada penerima fidusia untuk melunasi utang.

Pasal 30 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia mewajibkan pemberi fidusia untuk menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Dalam hal pemberi fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.

Khusus dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia terdiri atas benda-benda perdagangan atau efek yang dapat dijual dipasar atau di bursa, penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 31 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia). Bagi efek yang terdaftar pada Bursa di Indonesia , maka peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal otomatis akan berlaku.

Ketentuan yang diatur dalam pasal 29 dan 31 UUJF sifatnya mengikat dan tidak dapat dikesampingkan atas kemauan para pihak. Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan 31 UUJF adalah batal demi hukum.

Pengalihan hak kepemilikan dengan cara *constitutum prossessorium*⁵² adalah dimaksudkan semata-mata untuk member agunan dengan hak yang didahulukan kepada penerima fidusia, maka sesuai dengan Pasal 33 UUJF. setiap janji yang member kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila debitur cidera janji adalah batal demi hukum (Pasal 32 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Jaminan Fidusia).

⁵² *Constitutum Possessorium* adalah suatu keadaan dimana benda tetap dikuasai debitur tapi hak milik atas benda tersebut telah berpindah tangan kepada kreditur.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet Pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Pekanbaru.

Perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada PT. Bank Mandiri(Persero) Tbk. Pekanbaru adalah perjanjian yang dibuat untuk usaha kecil menengah (UKM) atau pada Bank Mandiri dinamakan *Micro Buissnes Unit*. Perjanjian Kredit yang diikat dengan jaminan fidusia merupakan perjanjian yang berdasarkan atas kepercayaan, maksudnya adalah pihak bank meminjamkan dana kepada debitur dan debitur memberikan jaminan untuk utangnya, jaminan tersebut tetap berada pada debitur hanya saja bukti kepemilikannya yang disimpan oleh bank, gunanya apabila suatu hari terjadi wanprestasi maka pihak bank akan mengambil alih jaminan tersebut untuk dijadikan sebagai pelunasan utang debitur.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pimpinan kredit Bpk. M. Adil Yusrizal ada sekitar 3.41% kredit yang tidak dibayarkan, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor.⁵³

Dari hasil wawancara penulis dengan narasumber , adapun faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet yaitu :

1. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bpk. M. Adil Yusrizal selaku pimpinan kredit, faktor penyebab terjadinya kredit macet ada yang

⁵³ Wawancara dengan Pimpinan Kredit Bpk. M. Adil Yusrizal pada 20 Juli 2013.

berasal dari pihak bank yaitu terdapatnya kesalahan dalam verifikasi data dalam proses pemeriksaan tentang keabsahan suatu data debitur, yaitu adanya kesalahan/ketidaksengajaan pihak analis dalam menganalisa data-data yang diajukan oleh debitur.⁵⁴

2. Dan faktor lainnya adalah debitur melakukan kredit topengan maksudnya ialah debitur meminjam uang atas nama dirinya namun uang tersebut bukanlah untuk dirinya melainkan untuk orang lain, menurut pimpinan kredit hal ini dikarenakan pihak ketiga yang menerima dana tersebut namanya telah masuk dalam daftar *black list* bank sehingga menyebabkan ia tidak bisa meminjam dana kepada bank.⁵⁵
3. Faktor lainnya menurut pimpinan kredit yang menyebabkan terjadinya kredit macet adalah adanya sistem manajemen keuangan yang lemah pada usaha mikro. Kredit dengan jaminan fidusia adalah kredit yang diberikan kepada usaha mikro, manajemen keuangan yang lemah disini maksudnya adalah usaha mikro sering mencampurkan keuangan usaha dengan keuangan pribadi, sehingga ia tidak bisa mengatur dengan baik keuangan usaha yang akhirnya menyebabkan kerugian pada dirinya dan timbulnya kredit macet.
4. Selain faktor penyebab yang dikemukakan oleh pimpinan kredit, ada juga faktor penyebab yang dikemukakan oleh debitur yang mengalami kredit macet seperti yang dikemukakan oleh Bpk. Johan. Ia mengalami kredit

⁵⁴ Ibid.,

⁵⁵ Ibid.,

macet dikarenakan ia salah investasi, ia mengalihkan dana kredit tersebut, dana yang awalnya bertujuan untuk penambahan modal usahanya dialihkan untuk keperluan lain yang tidak berhubungan dengan usahanya.⁵⁶

5. Faktor penyebab terjadinya kredit macet karena salah investasi juga dialami oleh Bpk. Afrizal. Menurutnya sebagian dana kredit yang diberikan oleh bank memang untuk usahanya tapi sebagiannya lagi digunakan untuk keperluan sekolah anak-anaknya karena saat itu ia berada dalam kondisi keuangan yang krisis yang menyebabkan ia harus mengalihkan dana kredit tersebut.⁵⁷
6. Salah investasi juga dialami oleh Ibu Lasma, hal ini menurutnya dikarenakan banyaknya pengeluaran-pengeluaran yang tidak terduga sehingga mengharuskan ia memakai dana kredit tersebut.⁵⁸
7. Faktor penyebab kredit macet yang lain adalah Kondisi usaha debitur mengalami penurunan yang disebabkan oleh beberapa hal yaitu persaingan usaha yang semakin ketat, usaha mengalami kerugian yang besar. Hal ini seperti yang dialami Bpk. Surya yang menggunakan dana tersebut untuk usaha perdagangannya. Menurutnya persaingan di dunia usaha semakin ketat dan menyebabkan usahanya tersaingi oleh para pelaku usaha lainnya

⁵⁶ Wawancara dengan Bpk. Johan, Debitur yang mengalami kredit macet dengan jaminan fidusia pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Pekanbaru 29 Oktober 2013.

⁵⁷ Wawancara dengan Bpk. Afrizal, Debitur yang mengalami kredit macet dengan jaminan fidusia pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Pekanbaru 29 Oktober 2013.

⁵⁸ Wawancara dengan Ibu Lasma, Debitur yang mengalami kredit macet dengan jaminan fidusia pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Pekanbaru 29 Oktober 2013.

yang akhirnya menimbulkan kemacetan usaha dan kemacetan pembayaran kredit pada bank.⁵⁹ Hal seperti itu juga dialami oleh Ibu Dewi, ia mengatakan kebutuhan semakin meningkat sementara usahanya mengalami penurunan.⁶⁰

8. Faktor lain penyebab kredit macet adalah kegagalan usaha debitur, seperti yang dialami Ibu Murni, menurutnya kegagalan usaha yang dijalannya mungkin dikarenakan ia masih baru menekuni dunia usaha, sehingga ia belum tau bagaimana seluk beluk dunia usaha yang baik. Menurutnya ia belum mengetahui banyak tentang dunia usaha hanya saja begitu banyak dorongan dari para keluarga dan kerabat yang menyarankannya untuk membuka usaha walaupun ia masih belum tau banyak pengetahuan tentang itu.⁶¹
9. Faktor penyebab terjadinya kredit macet adalah hubungan debitur dengan mitra usahanya menurun, seperti yang dialami Bpk. Purnomo. Kredit yang diberikan oleh bank digunakannya untuk menambah persediaan barang dagangannya, namun dengan meningkatnya persaingan dunia usaha menyebabkan langganannya beralih ketempat lain dikarenakan harga-harga yang ditawarkan.⁶²

⁵⁹ Wawancara dengan Bpk. Surya, Debitur yang mengalami kredit macet dengan jaminan fidusia pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Pekanbaru 29 Oktober 2013.

⁶⁰ Wawancara dengan Ibu Dewi, Debitur yang mengalami kredit macet dengan jaminan fidusia pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Pekanbaru 29 Oktober 2013.

⁶¹ Wawancara dengan Ibu Murni, Debitur yang mengalami kredit macet dengan jaminan fidusia pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Pekanbaru 29 Oktober 2013.

⁶² Wawancara Bpk. Purnomo, Debitur yang mengalami kredit macet dengan jaminan fidusia pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Pekanbaru 29 Oktober 2013.

10. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Andina selaku kredit analis faktor lainnya yang menyebabkan debitur kredit macet adalah adanya itikad tidak baik dari debitur. Debitur secara financial mampu membayar utangnya, namun ia menunda-nunda untuk melakukan pembayaran.⁶³
11. Tingginya suku bunga kredit juga merupakan faktor penyebab terjadinya kredit macet, seperti yang dialami Bpk. Hendrik, menurutnya dengan pendapatan usaha yang pas-pasan dan tingginya suku bunga kredit membuatnya menunda-nunda pembayaran yang akhirnya terjadilah kredit macet.⁶⁴
12. Faktor lainnya adalah dana tersebut dibagi 2 oleh debitur, seperti yang dialami Ibu Maya, ia meminjam dana untuk keperluan usahanya, namun dana tersebut tidak semua diambil olehnya sebagiannya lagi dipinjamkan ke kerabatnya untuk keperluan usaha, dengan perjanjian bahwa pembayaran angsuran dilakukan secara bersama oleh mereka berdua, namun kerabatnya tersebut mengalami kesulitan keuangan yang membuat pembayaran angsuran tersendat-sendat sehingga terjadilah kredit macet.⁶⁵

⁶³ Wawancara Ibu Andina, Mikro Kredit Analis PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Pekanbaru 29 Oktober 2013.

⁶⁴ Wawancara dengan Bpk. Hendrik, Debitur yang mengalami kredit macet dengan jaminan fidusia pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Pekanbaru 29 Oktober 2013.

⁶⁵ Wawancara dengan Ibu Maya, Debitur yang mengalami kredit macet dengan jaminan fidusia pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Pekanbaru 29 Oktober 2013.

13. Faktor kredit macet lainnya adalah jaranganya membukukan pendapatan bersih usaha, seperti yang dialami oleh Bpk. Rudi.⁶⁶

Faktor-faktor diatas adalah faktor yang paling sering menyebabkan kredit macet. Apabila ada kejujuran dan keterbukaan dari kedua belah pihak, mungkin kredit macet ini tidak akan terjadi.

Berdasarkan hasil wawancara tentang faktor penyebab terjadinya kredit macet, dapat penulis uraikan bahwa adanya kesalahan terhadap verifikasi data tersebut merupakan kesalahan dari pihak bank dalam menganalisis keabsahan data debitur, menurut penulis pihak bank kurang teliti dalam menganalisis keabsahan data-data debitur, kredit harus dilakukan dengan analisa yang profesional sehingga nantinya tidak akan menimbulkan masalah yang tidak diinginkan.

Dalam Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa :

“ Dalam melaksanakan pemberian kredit bank wajib mempunyai keyakinan erdasarkan analisis yang mendalam atas itikad baik serta kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan ”.⁶⁷

Jadi bank wajib melakukan analisis yang mendalam atas permohonan kredit yang diajukan. Berdasarkan analisis tersebut bank akan memutuskan menolak atau menyetujui permohonan debitur. Oleh karna itu setiap melakukan analisis kredit harus teliti dan memuat penilaian yang lengkap dan sempurna terhadap data-data yang diajukan sehingga dapat dipertanggung jawabkan.

⁶⁶ Wawancara dengan Bpk. Rudi, Debitur yang mengalami kreditt macet dengan jaminan fidusia pada PT. Bank Mandir (Persero) Tbk. Pekanbaru Tnggal 29 Oktober 2013.

⁶⁷ Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Selain verifikasi data yang terdapat kesalahan ada juga faktor lainnya yaitu adanya salah investasi. Salah investasi ini merupakan kesalahan debitur, hal ini terjadi karena debitur tidak menggunakan dana kredit tersebut sesuai dengan tujuan awal pemberian kredit, seperti yang dialami oleh salah seorang debitur yang bernama Bpk. Johan, pada awalnya tujuan bapak Johan meminjam kredit adalah untuk penambahan modal usahanya, tetapi ia menggunakan untuk keperluan lain sehingga dana tersebut tidak mengalir sebagaimana tujuan awalnya. sebaiknya setelah pemberian kredit bank harus melakukan pemantauan terhadap kepatuhan debitur terhadap penggunaan kredit tersebut.

Terkait dengan kondisi usaha dan keuangan yang menurun ini dikarenakan ketatnya persaingan usaha, perkembangan ekonomi akhir-akhir ini semakin pesat sehingga mewajibkan para pelaku usaha untuk lebih meningkatkan kualitas usahanya agar tidak tersaingi oleh para pelaku usaha yang lain . Misalnya para pelaku usaha harus mencari sumber daya manusia yang lebih kreatif untuk memaksimalkan hasil usahanya dan ini tentu diharapkan akan meningkatkan pendapatan debitur dan menghindari potensi kredit macet. Seperti yang dialami Ibu Dewi dan Bpk. Surya, faktor yang menyebabkan mereka mengalami kredit macet ialah karena kondisi usahanya yang mengalami penurunan dan semakin meningkatnya kebutuhan sehingga menyebabkan turunnya kemampuan debitur untuk membayar kreditnya. Seperti yang telah penulis uraikan diatas bahwa perekonomian semakin berkembang pesat, sehingga menuntut debitur untuk lebih meningkatkan kualitas usahanya agar tetap bisa bertahan dan bersaing dengan

pelaku usaha lainnya. Misalnya dalam usaha perdagangan debitur terlalu banyak menyimpan stok barang tanpa memperhitungkan kelancaran perputaran barang dagangannya yang akhirnya menyebabkan dana yang diberikan bank mengendap pada pembelian barang tersebut, sementara pendistribusian dan permintaan pasar menurun atau sama sekali tidak ada permintaan sehingga menyebabkan ketidakmampuan mengembalikan dana bank. Meskipun dalam kondisi usaha yang mengalami penurunan debitur harus tetap semangat dan terus berjuang untuk menghadapi kesulitan usahanya dan tidak menyerah, apabila debitur menyerah terhadap usahanya maka hal ini tentu akan merugikan kedua belah pihak yakni debitur dan kreditur.

Jadi faktor-faktor penyebab terjadinya kredit macet diatas berasal dari pihak bank dan juga debitur. Dalam perjanjian kredit harus ada keterbukaan dari masing-masing pihak agar nantinya tidak menimbulkan hal yang tidak diinginkan. Pihak bank juga harusnya melakukan pengawasan terhadap kredit yang telah ia berikan kepada debitur, tujuannya agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Dengan melakukan pengawasan secara berkala terhadap usaha debitur mungkin akan mengurangi resiko kredit macet, karna bank memantau perkembangan usaha debitur dan apabila terjadi penurunan usaha bank akan memberikan masukan atau solusi yang baik untuk kelancaran usaha debitur.

B. Bentuk Penyelesaian Kredit Macet Pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Pekanbaru.

Jaminan merupakan sesuatu yang sangat erat hubungannya dalam pemberian kredit. Karna kredit yang telah diberikan oleh bank perlu diamankan. Tanpa adanya pengamanan, bank akan sulit menghindari resiko yang akan datang nantinya karna adanya wanprestasi dari debitur. Pengamanan tersebut berupa pengikatan jaminan tertentu. Dalam skripsi ini penulis membahas tentang jaminan yang diikat dengan fidusia.

Dalam proses perikatan kredit yang dijamin dengan benda bergerak tersebut diikat dengan secara fidusia sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, undang-undang ini memberikan pengertian bahwa fidusia adalah:

“ pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan yang mana hak kepemilikan dari benda tersebut tetap berada pada penguasaan pemilik benda tersebut ” .⁶⁸

Berdasarkan pengertian tersebut bank mempercayakan debitur untuk tetap menguasai atau menggunakan benda jaminan sesuai dengan fungsinya. Debitur wajib memelihara objek benda jaminan fidusia sebaik- baiknya. Selain itu debitur dilarang untuk mengalihkan benda jaminan fidusia tersebut kepada pihak ketiga.

Kredit dengan jaminan fidusia harus didaftarkan dan dibuat dengan akta notaris hal ini guna untuk memberikan kepastian hukum dan memberikan hak yang difahulukan terhadap kreditur apabila terjadi kredit macet.

⁶⁸ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Pemberian kredit dengan jaminan fidusia pada Bank Mandiri Pekanbaru bertujuan untuk membantu masyarakat yang memerlukan dana untuk modal usaha dan diharapkan dengan dana tersebut masyarakat akan dapat mengembangkan usahanya.⁶⁹

Tak jarang pemberian kredit oleh bank mengalami masalah seperti terjadinya kredit macet. Kredit macet adalah kredit yang pembayarannya tidak lancar/tersendat-sendat dikarenakan beberapa faktor yang telah penulis uraikan pada pembahasan sebelumnya.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Bank Mandiri, adapun apabila terjadi kredit macet maka akan ditempuh beberapa cara untuk penyelesaian kredit macet tersebut.

Berikut cara-cara yang ditempuh oleh bank mandiri dalam menyelesaikan kredit macet :⁷⁰

1. Restrukturisasi yaitu upaya yang dilakukan bank agar pihak debitur dapat memenuhi kewajibannya. Dalam restrukturisasi pihak bank dan debitur mengadakan kesepakatan tentang cara apa yang akan digunakan untuk menyelesaikan kredit macet tersebut, Restrukturisasi meliputi penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, penambahan dana kredit dan pengambil alih aset debitur.

⁶⁹ Wawancara dengan Mikro Kredit Analis, Ibu Andina Pada Tanggal 19 Juli 2013.

⁷⁰ Ibid., Ibu Andina.

Penyelesaian kredit macet dengan restrukturisasi adalah dengan cara sebagai berikut :

a. Penurunan suku bunga kredit.

Penurunan suku bunga kredit bertujuan untuk memberi keringanan kepada debitur. Jadi bunga yang harus dibayar debitur menjadi lebih kecil dibanding suku bunga sebelum terjadinya kredit macet. Dengan adanya penurunan suku bunga ini maka perlu dilakukan perubahan terhadap perjanjian kredit. Pasal yang mengatur tentang besarnya suku bunga diubah dan disesuaikan dengan besarnya penurunan suku bunga kredit. Jadi suku bunga yang awalnya 20% akan diturunkan menjadi 10% seperti yang dialami Bpk. Hendrik yang mana faktor yang menyebabkan ia kredit macet adalah karena tingginya suku bunga kredit maka bank akan menurunkan suku bunga kreditnya agar Bpk. Hendrik bisa memenuhi kewajibannya membayar utangnya.⁷¹

b. Perpanjangan jangka waktu kredit.

Perpanjangan jangka waktu kredit ini bertujuan memperingan debitur untuk mengembalikan hutangnya. Misalnya hutang yang seharusnya dibayar pada bulan Februari 2013 diperpanjang menjadi Februari 2014. Dengan adanya perpanjangan jangka waktu kredit memberikan kesempatan kepada debitur untuk melanjutkan usahanya dan memenuhi kewajibannya terhadap bank. Bank akan

⁷¹ Ibid.,

melakukan upaya apa saja agar dana kredit tersebut bisa kembali termasuk dengan perpanjangan jangka waktu kredit.⁷²

c. Penambahan dana kredit.

Strategi bank untuk penambahan dana kredit agar usaha debitur dapat berjalan kembali dan berkembang serta mampu menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk mengembalikan hutang lama dan hutang yang baru. Untuk penambahan dana kredit ini diperlukan analisa yang cermat dan akurat dan dengan penilaian yang tepat mengenai prospek usaha debitur karna debitur menanggung hutang yang lama dan yang baru. Usaha debitur harus mampu menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk melunasi kredit. Penambahan dana kredit harus diikuti dengan syarat-syarat tambahan berupa jaminan kredit. Seperti yang dialami oleh Bpk. Afrizal yang mana faktor penyebab ia kredit macet adalah karena salah investasi, dimana sebagian dana kredit dialihkan untuk keperluan yang lain sehingga ia tidak bisa memenuhi barang persediaan di tokonya. Melihat perkembangan usaha dari Bpk. Afrizal masih memungkinkan maka bank akan memberikan tambahan dana kepada Bpk. Afrizal. Bank dalam memberikan tambahan dana akan melakukan analisis yang cermat dan teliti serta bank juga mensyaratkan adanya penjaminan tambahan karna debitur akan menanggung dua utang yakni utang lama dan utang baru.⁷³

⁷² Wawancara dengan Bpk. M. Adil Yusrizal, Pimpinan Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Pekanbaru 29 Oktober 2013.

⁷³ Wawancara dengan Bpk. Afrizal, Debitur yang mengalami kredit macet dengan jaminan fidusia pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Pekanbaru Tanggal 29 Oktober 2013.

Jadi dengan restrukturisasi ini bank dan debitur akan bersepakat tentang cara apa yang efektif untuk mereka gunakan dalam menyelesaikan persoalan kredit macet tersebut.

Upaya Restrukturisasi diatas bertujuan untuk :

- a. Menghindarkan kerugian pada bank, karna bank harus menjaga kualitas kredit yang diberikan.
- b. Membantu meringankan kewajiban debitur sehingga dengan adanya keringanan tersebut debitur mempunyai kemampuan untuk melanjutkan kembali usahanya.
- c. Dengan tindakan penyelamatan diatas maka penyelesaian kredit melalui lembaga-lembaga hukum dapat dihindarkan karna penyelesaian melalui lembaga hukum dalam prakteknya memerlukan waktu, biaya dan tenaga yang tidak sedikit.⁷⁴

2. Somasi/Teguran.

Somasi atau peringatan oleh bank kepada debitur agar debitur memenuhi ketentuan perjanjian kredit, untuk memenuhi pembayaran utangnya baik utang pokok maupun bunga karna waktunya telah jatuh tempo. Somasi dapat dilakukan langsung oleh bank atau melalui bantuan pengadilan. peringatan dapat dilakukan beberapa kali. Bukti somasi ini dapat digunakan oleh bank sebagai alat bukti pada waktu mengajukan gugatan atau eksekusi melalui pengadilan.

⁷⁴ Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h.266.

Somasi menurut pasal 1238 KUHPdata adalah suatu peringatan atau perintah yang disampaikan pengadilan kepada debitur untuk segera membayar/menyelesaikan utangnya kepada bank. Somasi melalui pengadilan ini penting untuk menambah memperkuat pembuktian bahwa debitur telah wanprestasi. Secara yuridis somasi tidak mempunyai akibat hukum memaksa kepada debitur untuk membayar artinya jika debitur yang disomasi tetap tidak menghiraukan somasi tersebut maka bank tidak dapat memaksa. namun dengan adanya somasi diharapkan adanya tekanan psikologis dan membuat malu debitur sehingga debitur diharapkan menyelesaikan utangnya atau paling tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan utang-utangnya.

Pihak bank akan memberikan tiga kali somasi terhadap pihak debitur yang tidak pernah menunjukkan itikad baiknya.

3. Penagihan dengan iklan atau media massa.

Bank sewaktu-waktu dapat memasang peringatan/pengumuman yang dibaca khalayak umum melalui iklan ataupun media massa ataupun ditempelkan pada barang yang menjadi jaminan kredit untuk penagihan terhadap utang-utangnya.⁷⁵

4. Penagihan langsung

Bank berhak melakukan penagihan langsung terhadap debitur yang kreditnya mengalami tunggakan. Penagihan langsung ini akan melibatkan pihak *Debt Collector*. Pihak *Debt Collector* akan melakukan penagihan langsung kepada

⁷⁵ Dokumen perjanjian kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Pekanbaru dengan jaminan fidusia.

debitur yang tidak bisa diajak untuk bermusyawarah dalam penyelesaian kredit macetnya. Menurut Bpk. M. Adil Yusrizal tidak semua debitur bisa diajak berkompromi tentang kredit macetnya, ada dari debitur-debitur tersebut yang sulit diajak untuk bermusyawarah, sehingga bank harus menggunakan jasa *Debt Collector* untuk melakukan penagihan langsung kepada debitur. Penagihan langsung baru akan dilakukan apabila pihak bank telah beberapa kali memberikan somasi namun tidak dihormati oleh pihak debitur.⁷⁶

Somasi dilakukan pihak bank apabila debitur tidak pernah memenuhi panggilan dari pihak bank, somasi ini memberikan peringatan kepada debitur untuk menyelesaikan utang-utangnya, apabila somasi tidak diindahkan oleh debitur maka bank akan melakukan penagihan melalui media massa ataupun melakukan penagihan secara langsung kepada debitur tanpa kesepakatan-kesepakatan terlebih dahulu karna pihak debitur selalu mengabaikan teguran dari pihak bank.

Berdasarkan hasil wawancara dengan debitur yang mengalami kredit macet adapun bentuk penyelesaian yang diterima oleh debitur tersebut adalah sebagai berikut :

1. Dengan cara penurunan suku bunga kredit, seperti yang dialami oleh Bpk. Hendrik, menurutnya tingginya suku bunga pada bank sementara usahanya mengalami penurunan membuatnya tersendat-sendat dalam melakukan pembayaran kredit yang akhirnya menimbulkan kredit macet. Menurut

⁷⁶ Bpk. M. Adil Yusrizal, *op.cit.*,

saat ia mengalami kredit macet bank memberitahukan kepadanya agar ia memenuhi kewajibannya membayar sisa utangnya, setelah itu ia mendatangi bank untuk meminta keringanan/solusi terhadap kredit macetnya tersebut dan dipilhlah penurunan suku bunga kredit untuk upaya penyelesaian kredit macetnya.⁷⁷

2. Eksekusi objek jaminan fidusia seperti yang dialami oleh Ibu Murni, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Murni, hal ini disebabkan karna usahanya mengalami kegagalan dan mengalami krisis ekonomi sehingga ia harus merelakan pihak bank melakukan eksekusi jaminan fidusia yaitu berupa 1 mobil dan 2 motor. Eksekusi ini dilakukan berdasarkan kesepakatan Ibu Murni dan pihak bank, hal ini dilakukan karena Ibu Murni memang tidak bisa untuk memenuhi sisa utangnya.⁷⁸
3. Pembayaran angsuran pokok kredit, hal ini seperti yang dialami oleh Bpk. Johan, pembayaran angsuran pokok kredit adalah pembayaran utang tanpa bunga. Bpk. Johan hanya membayar sisa pokok utangnya saja tanpa membayar bunganya, hal ini dilakukan berdasarkan kesepakatan dengan pihak bank. Karena pihak bank akan melakukan apa saja dalam hal menyelamatkan dana kredit yang telah diberikan.⁷⁹

⁷⁷ Wawancara dengan Bpk. Hendrik, Debitur yang mengalami kredit macet dengan jaminan fidusia pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Pekanbaru Tanggal 29 Oktober 2013.

⁷⁸ Wawancara dengan Ibu Murni, Debitur yang mengalami kredit macet dengan jaminan fidusia pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Pekanbaru Tanggal 29 Oktober 2013.

⁷⁹ Wawancara dengan Bpk. Johan, debitur yang mengalami kredit macet dengan jaminan fidusia pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Pekanbaru Tanggal 29 Oktober 2013.

4. Perpanjangan jangka waktu kredit seperti yang dialami oleh Ibu Lasma, ia dan pihak bank bersepakat untuk memperpanjang jangka waktu kreditnya agar ia tetap bisa melanjutkan usahanya dan memenuhi kewajibannya membayar utangnya.
5. Penambahan dana kredit seperti yang dialami oleh Bpk. Surya, hal ini didasarkan pada prospek perkembangan usahanya masih memungkinkan hanya saja ia perlu penambahan dana agar usahanya tersebut lebih berkembang lagi.⁸⁰
6. Pemberian somasi/teguran dari pihak bank seperti yang dialami oleh Bpk. Afrizal. Menurutnya pemberian somasi ini dikarenakan ia tidak pernah memenuhi panggilan dari pihak bank dikarenakan beberapa hal.⁸¹
7. Pemberian jangka waktu pembayaran tunggakan kredit, seperti yang dialami oleh Ibu Dewi, ia meminta kepada bank agar ia diberi waktu beberapa saat untuk membayar kewajibannya membayar utang-utangnya.⁸²
8. Pemberian jangka waktu pembayaran kredit juga dialami oleh Ibu Maya, ia merasa masih sanggup untuk memenuhi kewajibannya membayar utang-utangnya asal diberi jangka waktu untuk bisa melunasi utangnya.⁸³

⁸⁰ Wawancara dengan Bpk. Surya, Debitur yang mengalami kredit macet dengan jaminan fidusia pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Pekanbaru tanggal 29 Oktober 2013.

⁸¹ Wawancara dengan Bpk. Afrizal, Debitur yang mengalami kredit macet dengan jaminan fidusia pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Pekanbaru Tanggal 29 Oktober 2013.

⁸² Wawancara dengan Ibu Dewi, Debitur yang mengalami kredit macet dengan jaminan fidusia pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Pekanbaru Tanggal 29 Oktober 2013.

⁸³ Wawancara dengan Ibu Maya, Debitur yang mengalami kredit macet dengan jaminan fidusia pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Pekanbaru Tanggal 29 Oktober 2013.

9. Pembayaran angsuran pokok, hal ini seperti yang dialami oleh Ibu dewi yang kredit macetnya disebabkan karena kondisi usahanya yang menurun, jadi pihak bank memberi solusi agar ia membayar angsuran pokok nya saja.⁸⁴

10. Perpanjangan jangka waktu kredit seperti yang dialami Bpk. Rudi, setelah bank mengetahui penyebab ia kredit macet maka pihak bank memberikan arahan tentang usahanya serta memberikan perpanjangan jangka waktu kredit untuk menyelamatkan ia dari kredit macet.⁸⁵

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa bentuk penyelesaian kredit macet yang dilakukan Bank Mandiri terhadap debiturnya sangat beragam, pihak bank terlebih dahulu bertanya kepada debitur apa alasan mereka tidak membayar utangnya kemudian setelah itu pihak bank melakukan pengawasan terhadap debitur kemudian memberikan solusi yang terbaik untuk menyelesaikan kredit macet tersebut.

C. Proses Eksekusi Jaminan Fidusia dalam Penyelesaian Kredit Macet Pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Pekanbaru.

Eksekusi jaminan fidusia merupakan upaya terakhir yang dilakukan Bank Mandiri apabila langkah-langkah penyelesaian kredit macet diatas mengalami kegagalan. Proses eksekusi jaminan fidusia dalam penyelesaian kredit macet Bank Mandiri mengacu pada pasal 29 Ayat 1 Huruf C Undang-undang No. 42 Tahun

⁸⁴ Wawancara dengan Ibu Dewi, Debitur yang mengalami kredit macet dengan jaminan fidusia pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Pekanbaru Tanggal 29 Oktober 2013.

⁸⁵ Wawancara dengan Bpk Rudi, Debitur yang mengalami kredit macet dengan jaminan fidusia pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Pekanbaru Tanggal 29 Oktober 2013.

1999 Tentang Jaminan Fidusia, yaitu Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian akan diperoleh harga tertinggi dan menguntungkan para pihak.

Eksekusi baru akan dilaksanakan apabila bank merasa debitur benar-benar tidak bisa memenuhi lagi kewajibannya untuk membayar utang-utangnya. Dalam prakteknya bank jarang untuk melakukan eksekusi, namun dalam hal debitur memang sudah tidak bisa lagi untuk memenuhi kewajibannya maka pihak bank harus mengambil langkah eksekusi sebagai upaya penyelesaian dan penyelamatan terhadap kredit macetnya. Eksekusi yang dilakukan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Pekanbaru adalah Eksekusi dengan penjualan dibawah tangan. Penjualan dibawah tangan dilakukan dilakukan atas berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia agar prosesnya lebih cepat dikarenakan tanpa melakukan pelelangan umum.⁸⁶

Eksekusi jaminan dengan penjualan dibawah tangan ini dilakukan setelah lewat waktu satu bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi fidusia kepada pihak yang berkepentingan kemudian diumumkan sedikitnya dalalam dua surat kabar yang beredar didaerah yang bersangkutan dan yang terakhir tidak ada pihak yang merasa keberatan.

Proses eksekusi dengan penjualan dibawah tangan melalui beberapa tahapan yaitu :⁸⁷

1. Tahap pemberitahuan eksekusi jaminan

⁸⁶ Ibid.,

⁸⁷ Ibid.,

Pada tahap ini bank akan memberi tahukan kepada debitur bahwa bank akan melakukan proses eksekusi terhadap benda objek jaminan fidusia. Pemberitahuan ini akan diberitahu beberapa hari sebelum tanggal eksekusi dilaksanakan hal ini dikarenakan untuk memperoleh kepastian atas itikad baik dari debitur untuk memberikan benda jaminan fidusia kepada pihak bank.

2. Tahap penarikan jaminan fidusia

Setelah tahap pemberitahuan proses eksekusi maka bank akan melakukan penarikan benda yang menjadi objek jaminan fidusia ditangan debitur.

3. Tahap penjualan objek jaminan fidusia

Tahap penjualan ini dilakukan oleh debitur sendiri, tetapi harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Pekanbaru.Dan debitur tidak bisa menjual benda tersebut berdasar kan harga yang ditetapkannya sendiri.

4. Tahap pembuatan memo penjualan benda jaminan fidusia

Setelah benda jaminan fidusia terjual dengan harga yang telah disepakati, maka debitur harus menyerahkan seluruh hasil penjualan guna untuk memproses lebih lanjut baik dari segi pengambilan pelunasan maupun pembuatan memo dan kuitansi pembayaran. Setelah semua pelunasan berjalan dengan baik maka bank harus memberitahukan dan menginformasikan secepatnya kepada Kantor Pendaftaran Fidusia untuk mencoret serta menghapus benda yang menjadi objek jaminan fidusia

dalam daftar fidusia dengan melampirkan bukti pembayaran dari bank bahwa debitur telah memenuhi kewajibannya.

5. Tahap pengembalian hasil penjualan

Apabila hasil penjualan benda tersebut melebihi dari utang-utang debitur maka bank akan mengembalikan sisa tersebut kepada debitur, akan tetapi apabila hasil penjualan masih kurang untuk menutupi utang debitur maka debitur tetap bertanggung jawab untuk melunasi utang-utangnya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Murni yang penyelesaian kredit macetnya dengan eksekusi jaminan fidusia, sebelum melakukan eksekusi, ia dan pihak bank terlebih dahulu bersepakat untuk melakukan eksekusi, kemudian ia akan diberitahu tentang kapan pelaksanaan eksekusi sekaligus menyerahkan benda yang menjadi jaminan fidusia kepada pihak bank untuk dilakukan penilaian terhadap harga jual benda.⁸⁸

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Pekanbaru lebih sering melakukan eksekusi dengan cara penjualan dibawah tangan. Pada prinsipnya setiap eksekusi harus melalui pelelangan umum, tapi pelelangan umum jarang menghasilkan harga tertinggi maka dilakukan penjualan dibawah tangan atas kesepakatan antara debitur dan pihak bank. Penjualan dibawah tangan prosesnya lebih cepat dibanding dengan pelelangan.

⁸⁸ Wawancara dengan Ibu Murni, Debitur yang mengalami kredit macet dengan jaminan fidusia pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Pekanbaru 29 Oktober 2013.

Eksekusi jaminan fidusia oleh bank dilakukan sebagai alternatif terakhir dalam penyelesaian kredit macet bilamana debitur telah menunjukkan kredit yang 7buruk. Hal ini ditandai dengan tidak patuhnya debitur dalam menyelesaikan tunggakan kreditnya, tidak mengindahkan peringatan bank, atau menunjukkan itikad tidak baik atau kehendak tidak mau bekerjasama dengan bank.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Pekanbaru faktor kredit macet tersebut berasal dari internal bank dan ekseternal seperti debitur. Faktor internal bank adalah adanya kesalahan dalam verifikasi data nasabah, dan faktor eksternal yang sering menyebabkan debitur mengalami kredit macet adalah adanya salah investasi serta kondisi usaha debitur yang menurun. Faktor lainnya adalah debitur melakukan kredit topengan, tingginya suku bunga kredit pada bank, hubungan debitur dengan mitra usaha menurun dan adanya itikad tidak baik dari debitur untuk melusasi utangnya.
2. Penyelesaian kredit macet dalam perjanjian kredit yang diikat dengan jaminan fidusia pada Bank Mandiri tidaklah menyulitkan pihak debitur. Bank akan memberikan solusi yang baik agar debitur kembali mampu untuk memenuhi kewajibannya, setelah bank mengetahui ada debitur yang mengalami kemacetan maka bank akan melakukan panggilan untuk bermusyawarah kepada debitur tentang bagaimana kelanjutan kreditnya tersebut. Penyelesaian yang dilakukan bank bank mandiri sangat beragam, itu semua semata-mata agar dana kredit tersebut bisa kembali.

3. Proses eksekusi jaminan fidusia dalam hal terjadinya kredit macet Pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Pekanbaru mengacu pada Pasal 29 Ayat 1 Huruf C Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yaitu penjualan dibawah tangan. Penjualan dibawah tangan karna lebih cepat dibanding pelelangan. Penjualan dibawah tangan dilakukan atas kesepakatan debitur dan pihak bank.

B. Saran

1. Pihak bank dalam memberikan kredit harus lebih berhati-hati lagi dan memperhatikan prinsip pemberian kredit agar nantinya tidak menimbulkan masalah dan pihak bank setelah memberikan kredit hendaknya melakukan pengawasan secara berkala terhadap perkembangan usaha debitur, agar apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pihak bank sudah mengetahui dan bisa mengambil tindakan-tindakan untuk menghindari adanya kredit macet.
2. Debitur selaku peminjam dana dari bank harus mempunyai itikad yang baik dalam perjanjian, dan apabila ada sesuatu hal yang terjadi pada usaha ataupun kewajibannya membayar utang hendaknya memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak bank agar bisa bersepakat untuk mencari solusinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anneahira, <http://www.anneahira.com/kredit-macet-dan-permasalahannya.html>. Pekanbaru 28 Mei 2013.
- Bahsan, M, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2010
- Djumhana, Muhammad, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Yogyakarta: CV. Andi, 2000.
- Fuady, Munir, *Jaminan Fidusia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- _____, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Hendy, *Prinsip Pemberian Kredit*, <http://ngenyiz.blogspot.com/2009/02/prinsip-pemberian-kredit-5c-principle.html>. Pekanbaru 22 April .
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia (Edisi Revisi)*, Jakarta: Kencana, 2009.
- _____, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006.
- Patrik, Purwahid, *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, Bandung: Manjar Maju, 1994.
- Patrik, Purwahid, Kushadi, *Hukum Jaminan*, Semarang: Undip Press, 1993.
- Setiawan, R, Pokok-pokok Hukum Perikatan, Bandung: Bina Cipta, 1994.
- Salim HS. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Jakarta: rajawali Press, 2000.
- Soejono dan Abdurahman, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakart: UI Press, 1986.
- Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Bandung: Alfabeta, 2009.

Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia (Suatu Kebutuhan Yang Di Dambakan)*, Bandung: Alumni, 2004.

Undang-Undang Tentang Jaminan Fidusia No. 42 Tahun 1999.

Undang-Undang Tentang Perbankan No. 10 Tahun 1998.

Untung, Budi, *Kredit Perbankan Indonesia*, Yogyakarta: CV. Andi, 2000.

Widjaja, Gunawan, Ahmad ,Yani, *Jaminan Fidusia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000.